

Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang

(Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang)

Siswita Novia

(Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: siswitanovia@gmail.com)

Fefri Indra Arza

(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vindra_msi@yahoo.co.id)

Henri Agustin

(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: henri_feunp@yahoo.co.id)

Abstract

The aim of this research is to identify the user information needs of the governmental financial reports. The population on this research were DPRD and SKPD at Padang City. The selection of the sample with total sampling method, with 87 respondents. Primary data were used in this research, collected with a direct survey using questionnaire that sent to Parlement Member and head of the finance department and finance department staff at every selected SKPD in the region of Padang. Descriptive analysis are used as analysis method and t test with using Statistical Package For Social Science (SPSS) as the tools. The research prove that there's no difference between financial Report that needs by DPRD and SKPD on Governmental Finacial Report. Also there's no difference between the compliance of rules information that needs by DPRD and SKPD on Governmental Financial Report. Meanwhile there are difference between performance information that needs by DPRD and SKPD on Governmental Financial Report, Performance information more need by DPRD and SKPD. And the last there's no difference between planning and budgeting information that needs by DPRD and SKPD on Governmental Financial Report.

Keywords: *information needs, govermental financial report, financial information*

1. Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mewujudkan *good government governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada satu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk pelaporan keuangan, dimana kita dapat melihat segala hal yang terjadi di dalam entitas tersebut, yaitu pemerintahan.

Setiap instansi yang ada di Indonesia harus menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu pertanggungjawabannya kepada negara. Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi standar akuntansi yang

berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut PP 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang harus disajikan itu meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran berlebih, neraca (laporan posisi keuangan), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi

akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Informasi akuntansi yang tersaji didalam pelaporan keuangan pemerintahan digunakan oleh berbagai pengguna. Mardiasmo (2004) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor dan kreditor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversight bodies*).

Masing-masing kelompok pengguna akan membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony (1978) dalam Jones dan Pendlebury (2000) membagi empat

kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu (1) menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap *survive* dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (*financial viability*), (2) membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan (*fiscal compliance*), (3) menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin (*management performance*), (4) membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang (*cost of service provided*).

Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi tentang ketidakesesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan penggunaannya, yaitu Carlson (1986), Daniels and Daniels (1991), Yuliari (2003), Martiningsih (2010) serta Armel (2010). Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985), Daniels and Daniels (1981), serta Mack and Ryan (2006). Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah berdasarkan riset terdahulu yaitu: (1) Kondisi keuangan, (2) kondisi ekonomi, (3) kepatuhan terhadap aturan, (4) kinerja, (5) perencanaan dan penganggaran, (6) naratif.

Sementara itu pengguna di Indonesia belum memanfaatkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah antara lain disebabkan oleh lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman SDM pemerintah terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri (Hapsari, 2008).

Regulasi akuntansi pemerintah di Indonesia menggunakan referensi

internasional yaitu IPSAS dengan memperhatikan praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan standar akuntansi pemerintah tidak diawali dengan riset “kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi laporan keuangan lebih merupakan proses kajian pustaka. Ini tentunya tidak mendasarkan pada kondisi riil kebutuhan masyarakat (Bastian, 2006) dalam Armel (2010). Untuk itu perlu dilakukan riset dalam akuntansi sektor publik untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna dalam laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini akan difokuskan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh DPRD dan SKPD. DPRD sebagai wakil atau representasi rakyat daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mempengaruhi dan memutuskan kebijaksanaan daerah terutama kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. DPRD sebagai salah satu pemakai laporan keuangan pemerintah memiliki kebutuhan akan informasi dalam laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD itu sendiri. Untuk itu disamping harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, informasi tersebut juga harus mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder.

SKPD memerlukan informasi keuangan untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang diterapkan, menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan dana

yang ada sebijak mungkin dan juga untuk membantu perencanaan dan pengendalian pengukuran kinerja serta membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penelitian ini akan bermanfaat dalam menentukan tingkat kepentingan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan ke DPRD. Walaupun studi ini tidak menjelaskan nilai berupa angka dari informasi tersebut, namun dengan mengetahui informasi yang dibutuhkan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan informasi keuangan, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja dan informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendorong pemerintah agar lebih menyadari pentingnya penyajian laporan keuangan secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses laporan keuangan tersebut, untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan informasi keuangan dari pemerintah, sehingga berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan bidang akuntansi sektor publik dan memberi sumbangan pemikiran atau ide untuk penelitian selanjutnya.

2. Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode.

2.2 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP 71 tahun 2010, komponen laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO) Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan pelaporan keuangan yang dikemukakan dalam Lampiran E.II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Drebin (1981), tujuan laporan keuangan pemerintah diturunkan dari kebutuhan penggunaannya. Demikian juga yang dinyatakan oleh International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study no 1 bahwa tujuan laporan keuangan hanya valid jika merefleksikan informasi pengguna laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*).
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
- e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi pegawai dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

2.4 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut PP 71 tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat;
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

Menurut Misra dalam Armel (2010), informasi akuntansi pemerintah digunakan oleh:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah.
- b. Badan Pengawas
Badan Pengawas adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
- c. Investor, Kreditor, dan Donatur
Pihak eksternal yang termasuk dalam investor, kreditor dan donatur meliputi badan atau organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun lembaga lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah.
- d. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintahan Daerah
Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori analis ekonomi dan

pemerhati pemerintahan daerah merupakan pihak-pihak, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain, yang menaruh perhatian atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintahan daerah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemerintah daerah karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur/bupati/walikota sebagai wakil pemerintah di daerah.

g. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)

Pemerintah suatu daerah dengan daerah lain saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam rangka melakukan pinjaman.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 16 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat; para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah.

2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah informasi yang:

1) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

5) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik (a) Penyajian Jujur, (b) dapat Diverifikasi, (3) netralitas, (4) Dapat Dibandingkan, dan (5) Dapat Dipahami

2.6 Hak dan kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan

Pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu:
 - 1) Mengetahui kebijakan pemerintah
 - 2) Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
 - 3) Mengetahui alasan yang dilakukannya untuk suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
- b. Hak untuk diberi informasi (*Right to be informed*), yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
- c. Hak untuk didengar aspirasinya (*Right to be heard and to be listened to*).

2.7 Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan

Masing-masing kelompok pengguna mungkin saja membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony (1978) dalam Jones dan Pendlebury (2000) membagi empat kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu :

- a. *Financial viability*
Yaitu menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap *survive* dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

- b. *Fiscal compliance*
Yaitu untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. *Management performance*
Yaitu menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin.
- d. *Cost of service provided*
Yaitu untuk membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang.

Menurut Willy Nofranita (2011) informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas Pelaporan Keuangan antara lain:

- a. Informasi kondisi keuangan. Informasi ini dibutuhkan oleh DPRD berkaitan dengan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah, untuk melihat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana pendapatan atau pengeluaran pemerintah pada periode yang bersangkutan
- b. Informasi kepatuhan terhadap aturan. DPRD membutuhkan informasi penyelenggaraan APBD apakah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Informasi kinerja. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan rencana srategik dan prioritas program yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Informasi perencanaan dan penganggaran, mengenai informasi target penerimaan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran dimasa datang. DPRD membutuhkan informasi ini untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kepada program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaannya dan perencanaan anggaran nantinya

sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD.

Menurut Mardiasmo (2002), pemerintah sebagai manajemen publik salah satunya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), membutuhkan informasi atas pelaporan keuangan pemerintah. Informasi yang diperlukan oleh manajemen publik antara lain:

- a. Informasi Kondisi Keuangan
SKPD memerlukan informasi keuangan salah satunya informasi akuntansi untuk dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- b. Informasi Kinerja
Informasi kinerja dibutuhkan untuk menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan dana sebijak mungkin dan juga untuk membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
- c. Informasi Kepatuhan terhadap Aturan
Informasi ini diperlukan untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang diterapkan.
- d. Informasi Perencanaan dan Penganggaran
Untuk melihat daftar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985) dalam Martiningsih (2008). Kemudian dilanjutkan oleh Daniels and Daniels (1991), serta Mack and Ryan(2006) dalam Martiningsih (2010).

Armel (2010) melakukan penelitian mengenai kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitiannya menunjukkan bahwa informasi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan

penganggaran serta informasi naratif di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aturan pelaporan pemerintah belun sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Willy melakukan penelitian pada tahun 2011 mengenai kebutuhan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan daerah yang paling dibutuhkan DPRD yakni informasi kepatuhan aturan, informasikinerja, informasi perencanaan anggaran dan informasi keuangan.

Yuliari (2003) melakukan penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholders akan informasi pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggali lebih dalam dan mengidentifikasi mengenai hal-hal penting yang diinginkan oleh stakeholders sehubungan dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya dari laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholder akan informasi pelaporan keuangan pemerintah antara lain, stakeholders membutuhkan informasi yang terklarifikasi dengan baik ke dalam aktiva dan pasiva bagi stakeholders seperti pengamat ekonomi dan badan eksekutif pemerintah membutuhkan informasi daftar hutang dan rincian pembayarannya.

2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan

latar belakang dari kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Dapat dijelaskan bahwa jenis informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan khususnya DPRD dan SKPD yaitu informasi mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran.

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1:** Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dengan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah
- H2:** Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah
- H3:** Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah
- H4:** Terdapat perbedaan kebutuhan informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan penelitian komparasi. Penelitian komparasi merupakan penelitian yang membandingkan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama, atau ada perbedaan dan kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik (Arikunto, 2010). Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah di DPRD dan SKPD yang ada di kota Padang dan juga untuk mengetahui apakah DPRD dan

SKPD tersebut sama kebutuhan informasinya.

3.2 Populasi, Sampel Dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di kota Padang.

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD kota Padang yang berjumlah 45 orang dan SKPD yang ada di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemko Padang jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 42 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Teknik pengambilan sampel *total sampling* dimana seluruh populasi SKPD yang terdapat di kota Padang dan seluruh anggota DPRD Kota Padang dijadikan sampel. Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Padang dan Kepala Bagian akuntansi/keuangan dan staf akuntansi/keuangan di masing-masing SKPD.

3.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok atau seseorang yang menjadi responden.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat

pertanyaan/ Pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner disebarluaskan secara langsung dan melalui pos pada responden, responden diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yang diberikan berisi tiga hal utama yaitu karakteristik dari responden sudah menggunakan pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan dan pertanyaan tertutup untuk mengidentifikasi kebutuhan DPRD Kota Padang dan SKPD se-Kota Padang atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan-pernyataan untuk mengidentifikasi kebutuhan DPRD Kota Padang dan SKPD se-Kota Padang atas informasi atas pelaporan keuangan pemerintah daerah semuanya bersifat positif dengan pengukuran skala likert.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah diadopsi dari instrumen penelitian Armel Yentifa (2010) yang dikembangkan dari hasil penelitian Martiningsih (2008) yang dikembangkannya dari penelitian Anthony (1979), Drebin et.al (1981), Jones (1985), Daniels and Daniels (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study 1* (1991), Mack & Ryan (2006), dan *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) No. 1* (2007).

Pengembangan kebutuhan pengguna ada dalam penelitian terdahulu didasarkan pada tujuan pelaporan keuangan pemerintahan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai dan memprediksi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja operasional, perencanaan dan penganggaran, serta informasi naratif.

3.6 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Corrected Product Moment*. Jika r hitung $>$ r table dan bernilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. *Pilot test* akan dilakukan pada mahasiswa akuntansi FE UNP Konsentrasi sektor publik.

3.7 Uji Reliabilitas

Reliabilitas tes merupakan suatu ukuran ketepatan suatu tes apabila diteskan ke objek yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α).

Dengan kriteria menurut Sugiyono (2012: 257) sebagai berikut:

0.00 - 0,199 = reliabilitas tes sangat rendah
 0.20 - 0,399 = reliabilitas tes rendah
 0.40 - 0,599 = reliabilitas tes sedang
 0.60 - 0,799 = reliabilitas tes tinggi
 0.80 - 1,000 = reliabilitas tes sangat tinggi

3.8 Uji Coba Instrumen

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r hitung besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik, anggaran dan audit kinerja manajemen dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item- Total Correlation*. Jika r hitung besar dari r tabel maka dapat

dikatakan valid. Dimana r_{tabel} untuk $n = 30 - 2 = 28$ adalah 0.361. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item pertanyaan semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

3.9 Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2006).
2. Informasi kondisi keuangan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
3. Informasi kepatuhan terhadap aturan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku (Martiningsih, 2008).
4. Informasi kinerja, yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
5. Informasi perencanaan dan penganggaran, yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah (Martiningsih,

2008).

3.10 Teknik Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Adapaun uji t digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian

4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif

Jawaban responden mengenai pertanyaan tentang informasi yang dibutuhkan oleh responden, diperoleh urutan informasi yang diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan derajat kepentingan sebagai berikut:

Rangking	Indikator Pertanyaan	Rerata	Kriteria
1	Kepatuhan terhadap Aturan	4,513	Sangat Penting
2	Kinerja	4,257	Sangat penting
3	Kondisi Keuangan	4,244	Sangat Penting
4	Perencanaan dan Penganggarn	4,165	Penting
Rata-rata		4,294	Sangat Penting

Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh SKPD dan DPRD berikut ini akan diuraikan 10 informasi yang paling dibutuhkan oleh SKPD dan DPRD :

No	Keterangan	Rerata	Kriteria
1	Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual	4,609	Sangat Penting
2	Laporan pertanggungjawaban kepala pemda	4,579	Sangat Penting
3	Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan standar akuntansi	4,576	Sangat Penting

4	Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan	4,474	Sangat Penting
5	Perubahan aktiva bersih/ekuitas	4,452	Sangat Penting
6	Trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk	4,444	Sangat Penting
7	Kebijakan akuntansi	4,434	Sangat Penting
8	Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode	4,416	Sangat Penting
9	Stabilitas Politik	4,413	Sangat Penting
10	Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang	4,322	Sangat Penting

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Hipotesis 1

Informasi Kondisi Keuangan	SKPD	DPRD
Kelompok Data	N= 32 Mean = 33,34 Std. = 3,347	N=45 Mean = 34,13 Std. = 2,920
Sig.	0,287	
Alpha	0,05	
Kesimpulan	Sig. \geq 0,05, maka H1 Ditolak	

Hipotesis 2

Informasi Kepatuhan	SKPD	DPRD
Kelompok Data	N= 32 Mean = 33,67	N=45 Mean = 42,79
Sig.	0,066	
Alpha	0,05	
Kesimpulan	Sig. \geq 0,05, maka H2 Ditolak	

Hipotesis 3

Informasi Kinerja	SKPD	DPRD
Kelompok Data	N= 32 Mean = 29,95	N=45 Mean = 45,43
Sig.	0,002	
Alpha	0,05	
Kesimpulan	Sig. \leq 0,05, maka H3 diterima	

Hipotesis 4

Informasi Perencanaan	SKPD	DPRD
Kelompok Data	N= 32 Mean = 36,47	N=45 Mean = 40,80
Sig.	0,3	
Alpha	0,05	
Kesimpulan	Sig. \geq 0,05, H4 ditolak	

4.3 Pembahasan

Informasi yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang pertama adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kepatuhan terhadap aturan yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku. Informasi ini mencakup 1) kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan. 2) Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemda. 3) Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). 4) Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu Martiningsih pada tahun 2008 dan Armel Yentifa pada tahun 2010, yang mengatakan bahwa informasi kepatuhan terhadap aturan dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

Selanjutnya informasi yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah adalah informasi kondisi keuangan, informasi kondisi

keuangan yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi ini mencakup: 1) Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan. 2) Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan. 3) Perubahan aktiva bersih/ekuitas. 4) Rincian hasil operasional pemda selama 1 periode pelaporan. 5) Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar) 6) Kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 7) Rincian dan analisis jumlah hutang pemda. 8) Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Martiningsih (2008) dan Armel Yentifa (2010) yang mengatakan informasi mengenai kondisi keuangan diperlukan oleh pengguna sebagai informasi yang ada dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah adalah informasi perencanaan dan penganggaran, Informasi perencanaan dan penganggaran yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi ini mencakup: 1) Perencanaan pemda 5 tahun kedepan. 2) Perencanaan alokasi sumber daya. 3) Trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang. 4) Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda. 5) Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan. 6) Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional Pemda

Temuan ini konsisten dengan penelitian Martiningsih (2008) dan Armel Yentifa (2010) yang mengatakan informasi mengenai perencanaan dan penganggaran diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai informasi yang ada dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kinerja, informasi kinerja yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi ini mencakup: 1) Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya. 2) Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemda, seperti: pelayanan perizinan dan tarifnya. 3) Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemda. 4) Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemda. 5) Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Martiningsih (2008) dan Armel Yentifa (2010) yang mengatakan informasi tentang kinerja diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai informasi yang ada dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Sementara jenis informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang pertama adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kepatuhan terhadap aturan yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku. Informasi ini mencakup 1) kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan. 2) Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemda. 3) Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). 4)

Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Martiningsih (2008) dan Armel Yentifa yang mengatakan bahwa informasi mengenai kepatuhan terhadap aturan dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah

Selanjutnya informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas pelaporan keuangan pemerintah adalah informasi mengenai kinerja, informasi kinerja yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi ini mencakup: 1) Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya. 2) Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemda, seperti: pelayanan perizinan dan tarifnya. 3) Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemda. 4) Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemda. 5) Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Martiningsih (2008) dan Armel Yentifa (2010) yang mengatakan informasi tentang kinerja diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai informasi yang ada dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh DPRD atas pelaporan keuangan pemerintah adalah informasi kondisi keuangan, informasi kondisi keuangan yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi ini mencakup: 1) Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan. 2) Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan. 3) Perubahan aktiva bersih/ekuitas. 4) Rincian hasil operasional pemda selama 1 periode pelaporan. 5) Sumber dan penggunaan

sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar) 6) Kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 7) Rincian dan analisis jumlah hutang pemda. 8) Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Armel Yentifa (2010) dan Martiningsih (2008) yang mengatakan informasi kondisi keuangan dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah

Informasi selanjutnya yang dibutuhkan oleh DPRD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi perencanaan dan penganggaran. Informasi perencanaan dan penganggaran yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah (Martiningsih, 2008). Informasi ini mencakup: 1) Perencanaan pemda 5 tahun kedepan. 2) Perencanaan alokasi sumber daya. 3) Trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang. 4) Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda. 5) Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan. 6) Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemda.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Martiningsih (2008) dan Armel Yentifa yang mengatakan bahwa informasi perencanaan dan penganggaran sebagai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya pengujian hipotesis mengatakan H1 ditolak karena nilai sig $0,275 \geq 0,05$, hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas

pelaporan keuangan pemerintah daerah. DPRD dan SKPD sama-sama membutuhkan informasi kondisi keuangan yang terdiri dari informasi posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode, prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan, perubahan aktiva bersih/ekuitas, rincian hasil operasional pemda selama 1 periode pelaporan, sumber dan penggunaan sumber daya, kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, rincian dan analisis jumlah hutang pemda dan prediksi pertumbuhan pendapatan pemda.

Hasil pengujian hipotesis selanjutnya untuk H2 ditolak karena nilai sig $0,066 \geq 0,05$, hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah. DPRD dan SKPD sama-sama membutuhkan informasi kepatuhan terhadap aturan yang terdiri dari informasi mengenai kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan, kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemda, kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan SAP dan informasi mengenai perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran.

Sementara pengujian hipotesis untuk informasi kinerja mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kebutuhan DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga kesimpulannya H3 diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DPRD lebih membutuhkan informasi kinerja yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan SKPD.

Hasil ini diperoleh setelah melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Uji t yang dipakai

dalam penelitian ini adalah Kruskal Wallis test. Hasil dari uji tersebut sig $0,002 \leq 0,05$, hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan.

Selain itu, terlihat juga perbedaan dari nilai rata-rata untuk masing-masing kebutuhan informasi pengguna, tingkat kebutuhan informasi DPRD sebesar 45,43 dan tingkat kebutuhan informasi SKPD sebesar 29,95 sehingga diperoleh selisih rata-rata sebesar 15,48.

Selanjutnya pengujian hipotesis untuk informasi perencanaan dan penganggaran mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kebutuhan DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H4 ditolak karena nilai sig $0,386 \geq 0,05$. DPRD dan SKPD sama-sama membutuhkan informasi perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari informasi perencanaan pemda 5 tahun kedepan perencanaan alokasi sumber daya, trend ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang, prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda, prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan serta informasi mengenai prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemda.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang dibutuhkan oleh SKPD dan DPRD atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran.
2. Terdapat perbedaan antara informasi

yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu informasi kinerja. Informasi kinerja lebih dibutuhkan oleh DPRD dibandingkan dengan SKPD.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebar.
2. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, sebaiknya eksekutif menyusun laporan keuangan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pengguna sehingga pengguna dapat menggunakannya dengan baik untuk pengambilan keputusan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih

mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk melengkapi sampel pengguna laporan keuangan lain seperti masyarakat, investor, kreditor dan badan pengawas.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anthony, R. N. 1978. *Financial Accounting in Nonbusiness Organizations*. *Financial Accounting Standards Board*. Stamford. Conn.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Carlson, Frederick J. 1986. User needs: A Survey of Individual Citizen Uses of Municipal Financial Information. *Government Finance Review*. Chicago: October 1986. Vol 2 Issue 5
- Daniels, Janet D., and Daniels, Craig E. 1991. Municipal Financial Reports: What Users Want. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 10 Issue 1 pp. 15-38.
- Drebin, A. R., Chan, J. L. and Ferguson, L. C. 1981. Objectives of Accounting and Financial Reporting for Governmental Units: A Research Study. *National Council on Governmental Accounting*, Vol. 1 & 2, Chicago, USA.
- Government Accounting Standards Board (GASB). 1994. *Concept Statement No. 2 related to Service Efforts and Accomplishments Reporting*.
- Harahap, Sofyan Safri. 2003. *Teori Akuntansi, Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raspindo.

- Harahap, Sofyan Safri. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hery.2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Kencana.
- International Federation of Accountants (IFAC). 1991. Public Sector Committee (PSC) Study Nomor 1. *Financial Reporting by National Governments*.
- International Public Sector Accounting Standards Board. International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)
- 1 *Presentation of Financial Statements*. Issued January 2007
- Jones, D. B., Scott, R. B., Kimbro, L. and Ingram, R. 1985. *The Needs of Users of Governmental Financial Reports*, GASB Research Reports 1.
- Mack, Janet and Christine Ryan. 2006. Reflections on the Theoretical Underpinnings of the General-Purpose Financial reports of Australian government Departments, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 19 No. 4, pp. 592-612.
- Manao, Hekinus. *Kilas Balik UU Bidang Keuangan Negara dan Agenda Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menapak Perjalanan Lima Tahun Implementasi Paket Undang-Undang Keuangan Negara 14 Juni 2008.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martiningsih, Sri Pancawati. 2009. Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12.Padang
- Nofranita, Willy. 2011. Kebutuhan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota di Sumatera Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF
- Yentifa, Armel , Yuntifa & Suhanda. Kebutuhan Investor dan Kreditor atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12. Padang
- Yuliari, Gusti Putu Ayu. 2003. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi Eksploratif mengenai Kebutuhan dan Permintaan *Stakeholder* akan Informasi Keuangan Pemerintah. Tesis UGM. Yogyakarta.
- Yusuf, A.Muri. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang. UNPPRESS

Halaman ini sengaja dikosongkan